

**Etika Keilmuan di Era Budaya Konten: Studi Kasus Influencer Akademik
Konten Sejarah Pada Akun Geza, Medan Art, dan Fasha Luth di TikTok**

Epriwina Gini Nurrahma¹, Dewa Agung Gede Agung²

¹Program Studi Pascasarjana Pendidikan Sejarah, ²Dosen Program Studi Pascasarjana
Pendidikan Sejarah

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana etika keilmuan diterapkan oleh tiga kreator konten sejarah di TikTok pada akun Geza, Medan Art, dan Fasha Luth yang mampu menyajikan pengetahuan sejarah di tengah budaya konten digital yang serba cepat, algoritmik, dan padat visual. Etika keilmuan, yang mencakup prinsip seperti communalism, universalism, disinterestedness, organized skepticism (Merton), serta etika epistemik tentang akurasi dan tanggung jawab moral (Goldman), menjadi kerangka utama dalam menilai bagaimana pengetahuan sejarah dibangun dan disebar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui analisis isi terhadap sejumlah video ketiga kreator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing kreator melakukan negosiasi berbeda antara tuntutan etika keilmuan dan tekanan budaya digital TikTok. Geza mengutamakan kejujuran naratif dan observasi lokasi sejarah, Medan Art memanfaatkan visual AI yang imajinatif dan mendorong kritik dari komunitas penonton, sementara Fasha Luth menampilkan bentuk paling akademik melalui penggunaan sumber tertulis, dokumenter asli, dan perspektif sejarah yang beragam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa budaya konten tidak selalu menghambat etika keilmuan, namun dapat menjadi ruang kolaboratif untuk membangun pengetahuan sejarah yang lebih komunikatif, kritis, dan dapat dipercaya oleh publik.

Kata kunci: Budaya Konten, Etika Keilmuan, Influencer Akademik, Konten Sejarah, Tiktok

Abstrack

This study aims to analyze how scientific ethics are applied by three historical content creators on TikTok on Geza, Medan Art, and Fasha Luth accounts who successfully present historical knowledge within a fast-paced, algorithm-driven, and visually dense digital content culture. Scientific ethics, which include principles such as communalism, universalism, disinterestedness, and organized skepticism (Merton), as well as epistemic ethics concerning accuracy and moral responsibility (Goldman), serve as the main framework for evaluating how historical knowledge is constructed and disseminated. This research employs a descriptive qualitative method through content analysis of selected videos from the three creators. The findings show that each creator negotiates differently between adhering to scientific ethics and responding to the pressures of TikTok's digital culture. Geza prioritizes narrative honesty and on-site observation, Medan Art utilizes imaginative AI-generated visuals that invite audience critique, while Fasha Luth presents the most academically oriented approach through the use of written sources, authentic documentary footage, and

diverse historical perspectives. These findings suggest that digital content culture does not inherently hinder scientific ethics; instead, it can serve as a collaborative space for developing historical knowledge that is communicative, critical, and trustworthy for the public.

Keywords: *Poverty, Open Unemployment, Inflation, Linear Regression, Public Policy.*

*Corresponding author:

E-mail: depitasinaga468@gmail.com

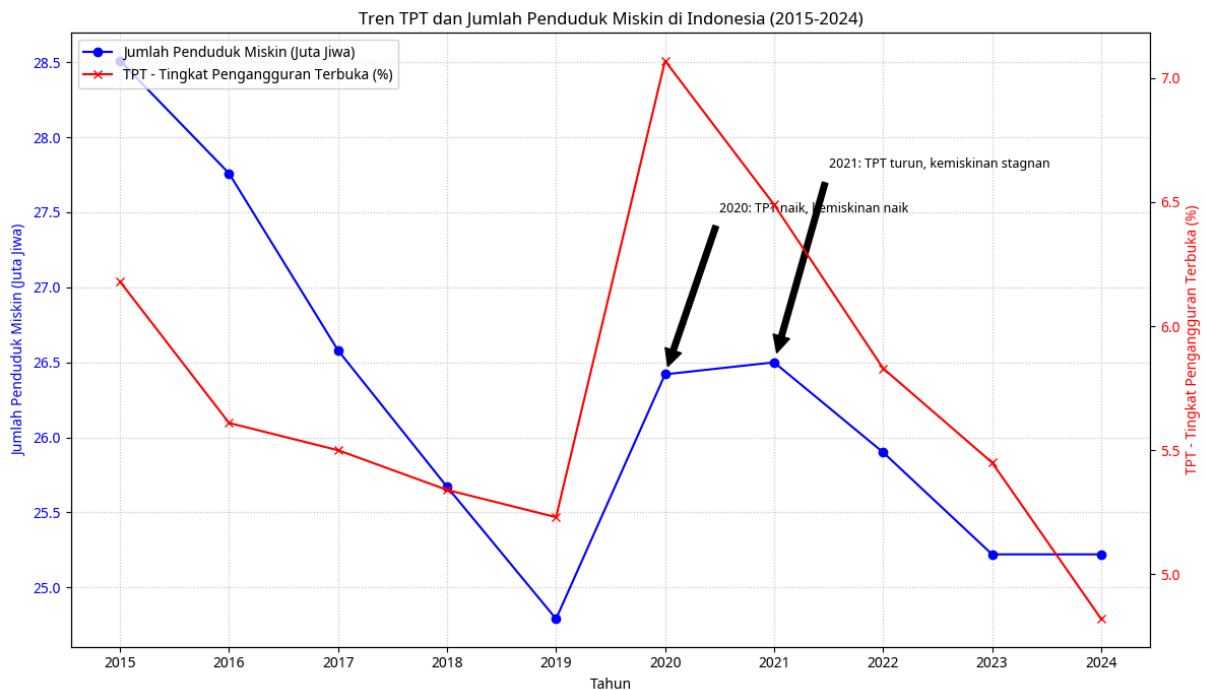
ISSN 2460-4585 (Print)

ISSN 2460-4593 (Online)

PENDAHULUAN

Kemiskinan tetap menjadi masalah multidimensional yang kompleks dan merupakan tantangan pembangunan utama, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai belahan dunia. Masalah ini mencakup lebih dari sekadar ketiadaan pendapatan, melainkan juga mencakup keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan (Ayoo, 2022). Secara operasional, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dari sisi konsumsi (makanan dan non-makanan), yang kemudian diterjemahkan ke dalam suatu garis kemiskinan. Individu dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis ini dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Secara empiris, dinamika kemiskinan di Indonesia dalam dekade terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada periode 2015 hingga 2019, jumlah penduduk miskin berhasil diturunkan secara konsisten dari 28,51 juta jiwa (11,13%) menjadi 24,79 juta jiwa (9,22%). Namun, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 membalikkan tren positif ini, di mana kemiskinan melonjak menjadi 26,42 juta jiwa (9,78%). Pasca pandemi, penurunan kemiskinan kembali berlangsung, namun dengan laju yang lebih lambat dan cenderung stagnan, seperti terlihat pada tahun 2023 dan 2024 yang sama-sama berada di angka 25,22 juta jiwa, meskipun persentasenya turun menjadi 9,03% pada 2024 akibat pertumbuhan populasi.

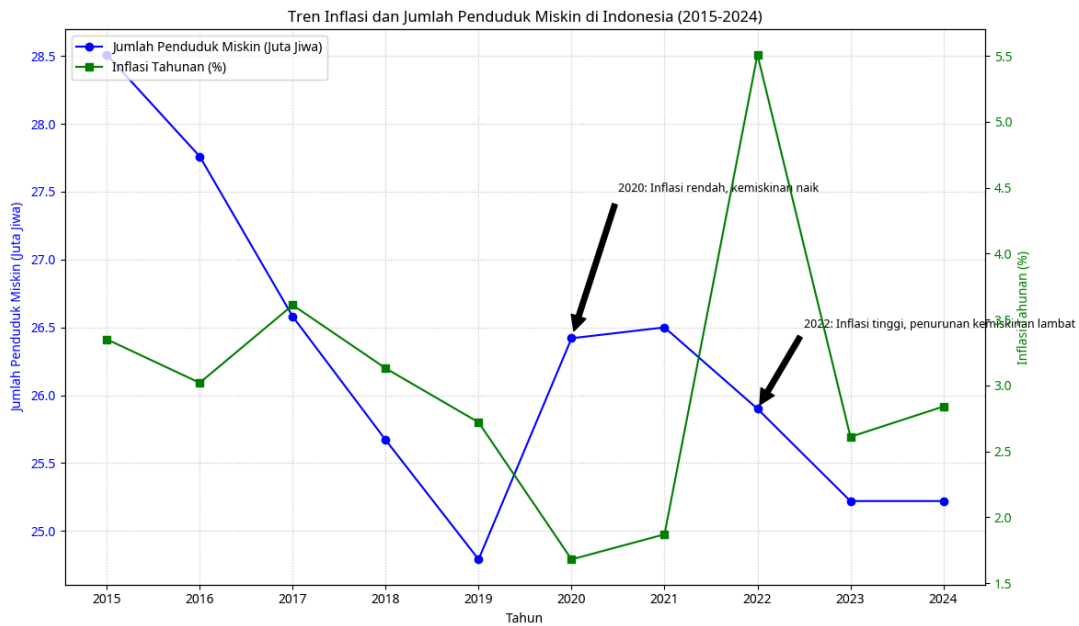


Banyak faktor yang saling berkaitan mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu negara, di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, dan kesempatan kerja. Secara teoretis, fenomena kemiskinan seringkali digambarkan dalam sebuah lingkaran setan (*vicious circle of poverty*). Seperti yang diungkapkan oleh Nurkse (2019), “a country is poor because it is poor,” yang berarti kemiskinan menciptakan kondisi yang membuat suatu ekonomi terus terjebak dalam

kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan menyebabkan rendahnya tabungan dan investasi, yang pada gilirannya membatasi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, sehingga kembali melanggengkan kemiskinan (Bauer, 2019; Hurry, 1917).

Salah satu faktor kunci dalam lingkaran setan ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang didefinisikan sebagai proporsi angkatan kerja yang sedang tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Hubungan logis antara pengangguran dan kemiskinan sangatlah langsung: pengangguran berarti hilangnya sumber pendapatan utama bagi rumah tangga. Tanpa pendapatan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan menjadi terancam, yang secara langsung meningkatkan kerentanan dan jumlah penduduk miskin (Johan et al., 2024; Ngubane et al., 2023). Namun, ketika melihat tren data TPT dan kemiskinan di Indonesia (2015-2024), hubungan ini tidak selalu linier. Pada tahun 2020, kenaikan tajam TPT menjadi 7,07% seiring dengan lonjakan kemiskinan membuktikan hubungan yang kuat. Akan tetapi, pada tahun 2021, meskipun TPT turun menjadi 6,49%, jumlah penduduk miskin justru stagnan di angka 26,50 juta jiwa. Ketidakkonsistenan ini menciptakan sebuah gap atau kesenjangan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Beberapa penelitian sebelumnya seperti Johan et al. (2024) dan Rambe et al. (2023) memang menemukan pengaruh signifikan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia, namun periode penelitian yang lebih mutakhir diperlukan untuk menangkap dinamika pasca-pandemi yang unik, di mana faktor-faktor lain mungkin ikut berperan.

Selain pengangguran, variabel makroekonomi lain yang diduga kuat mempengaruhi kemiskinan adalah Tingkat Inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode. Inflasi, terutama pada komoditas kebutuhan pokok, secara nyata menggerus daya beli masyarakat. Bagi rumah tangga yang penghasilannya tetap atau berada di sekitar garis kemiskinan, kenaikan harga dapat mendorong mereka jatuh ke bawah garis kemiskinan, sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin (Ivanic & Martin, 2008). Mekanisme hubungan ini kembali memperkuat konsep lingkaran setan kemiskinan. Analisis tren inflasi tahunan dan kemiskinan di Indonesia menunjukkan kompleksitas hubungan ini. Misalnya, pada tahun 2020, inflasi rendah (1,68%) justru diiringi oleh kenaikan kemiskinan, kemungkinan besar karena guncangan sisi penawaran akibat pandemi. Sebaliknya, pada tahun 2022, inflasi melonjak tinggi (5,51%) akibat gejolak global, namun penurunan kemiskinan hanya terjadi secara moderat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa dampak inflasi terhadap kemiskinan mungkin tidak sederhana dan dapat bergantung pada jenis inflasinya, apakah bersifat *cost-push* atau *demand-pull* (Adhikari et al., 2025; Chen & Semmler, 2025; Holzman, 2016). Penelitian seperti oleh Fadillah (2025) bahkan menemukan bahwa dampak inflasi terhadap kesejahteraan bisa negatif di negara berkembang, berbeda dengan di ekonomi maju.



Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Inflasi terhadap Kemiskinan di Indonesia (2015-2024)” menjadi sangat menarik dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsistensi dan kekuatan hubungan kedua variabel independen tersebut terhadap kemiskinan dalam konteks Indonesia selama satu dekade terakhir, yang mencakup periode normal, krisis pandemi, dan pemulihan ekonomi. Dengan memahami dinamika ini di era pasca-pandemi dan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang bermakna serta rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan akses terhadap sumber daya (Johan dkk., 2024). Dalam konteks Indonesia, kemiskinan menjadi tantangan yang terus menerus dihadapi, dengan variasi tingkat keparahan antardaerah (Rambe dkk., 2023). Salah satu pendekatan teoretis yang banyak dirujuk dalam memahami persistensi kemiskinan adalah teori lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse. Menurut Nurkse, kemiskinan cenderung melanggengkan dirinya sendiri melalui mekanisme sebab-akibat yang berulang (Bauer, 2019). Teori ini menyatakan bahwa sebuah negara miskin karena ia miskin, di mana kondisi kemiskinan menciptakan hambatan seperti rendahnya tabungan, investasi, dan produktivitas, yang pada akhirnya kembali memperdalam kemiskinan (Bauer, 2019). Konsep ini kemudian diperluas dengan memasukkan faktor-faktor seperti tingginya fertilitas, rendahnya tingkat pendidikan, degradasi lingkungan, dan lemahnya posisi perempuan dalam masyarakat, yang saling berinteraksi dan menjebak masyarakat dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus (Dworak dkk., 2016). Selain kemiskinan

absolut yang mengacu pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan juga dapat dipahami secara relatif melalui ketimpangan distribusi pendapatan, serta secara multidimensi dengan mempertimbangkan berbagai indikator non-moneter seperti akses kesehatan, pendidikan, dan sanitasi (Dartanto & Otsubo, 2013).

Teori Pengangguran

Di sisi lain, pengangguran merupakan salah satu variabel kunci yang sering dikaitkan dengan tingginya tingkat kemiskinan. Pengangguran tidak hanya mencakup pengangguran terbuka, tetapi juga pengangguran terselubung dan friksional. Pengangguran friksional terjadi akibat proses pencarian kerja yang memakan waktu, sementara pengangguran struktural sering kali diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri (Koning dkk., 1995). Dalam perspektif teori Keynesian, pengangguran disebabkan oleh ketidakcukupan permintaan agregat dalam perekonomian, sementara teori klasik lebih menekankan pada rigiditas upah dan intervensi pasar (Davidson dkk., 1988). Studi-studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Misalnya, penelitian Johan dkk. (2024) menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Sementara itu, penelitian Rambe dkk. (2023) menunjukkan bahwa meskipun pengangguran tidak selalu signifikan dalam semua model, faktor ketenagakerjaan seperti jenis pekerjaan, tingkat pendidikan pekerja, dan kerentanan pekerja luar sektor pertanian memiliki hubungan yang erat dengan kemiskinan.

Teori Inflasi

Selain pengangguran, inflasi juga merupakan variabel makroekonomi yang memengaruhi kemiskinan, terutama melalui mekanisme penurunan daya beli masyarakat. Inflasi dapat digolongkan menjadi inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*), yang terjadi ketika permintaan agregat melebihi penawaran, dan inflasi desakan biaya (*cost-push inflation*), yang dipicu oleh kenaikan biaya produksi seperti upah dan harga bahan baku (Holzman, 2016). Identifikasi yang tepat terhadap jenis inflasi sangat penting bagi perumusan kebijakan, karena kebijakan moneter yang ditujukan untuk mengendalikan inflasi *demand-pull* mungkin tidak efektif atau bahkan kontraproduktif jika inflasi yang terjadi adalah *cost-push* (Adhikari dkk., 2025). Sebuah studi di Australia menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi lebih sering didorong oleh faktor *cost-push*, dan kebijakan moneter cenderung lebih efektif mengatasi inflasi *demand-pull* (Chen & Semmler, 2025). Dampak inflasi terhadap kemiskinan juga bervariasi antara negara berpendapatan rendah dan negara maju. Di negara berpendapatan rendah, inflasi cenderung menurunkan tingkat kebahagiaan dan memperburuk kondisi kemiskinan, sementara di negara maju, inflasi dapat mencerminkan vitalitas ekonomi dan justru dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan (Fadillah, 2025). Selain itu, kenaikan harga pangan global juga terbukti meningkatkan kemiskinan di banyak negara berpendapatan rendah, karena sebagian besar rumah tangga miskin adalah konsumen bersih dari komoditas pangan (Ivanic & Martin, 2008).

Penelitian Terdahulu

Sebagai landasan empiris dari penelitian ini, tinjauan terhadap sejumlah studi terdahulu menunjukkan dinamika hubungan antara pengangguran, inflasi, dan kemiskinan, dengan konteks dan temuan yang beragam. Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Johan, Febrianti, Wahyuningtyas, Salim, & Prawira (2024) secara eksplisit mengonfirmasi bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini diperkuat dengan penggunaan data time series dan analisis regresi linear sederhana, yang menyimpulkan bahwa peningkatan angka pengangguran akan secara langsung memperburuk masalah kemiskinan di Indonesia. Temuan serupa mengenai dampak negatif pengangguran terhadap kesejahteraan juga disinggung oleh Fitri (2022), yang menekankan bahwa pengangguran yang meningkat, terutama selama pandemi, berpotensi memicu berbagai masalah sosial dan ekonomi yang pada akhirnya mendorong lebih banyak rumah tangga ke dalam jurang kemiskinan.

Namun, nuansa yang lebih kompleks diungkapkan oleh Rambe, Purmini, Alfansi, Armelly, & Yusnida (2023) dalam studinya di wilayah Sumatra. Mereka menemukan bahwa tingkat pengangguran secara statistik tidak signifikan memengaruhi kemiskinan, sementara faktor ketenagakerjaan lain seperti jenis pekerjaan, tingkat pendidikan pekerja, dan kerentanan pekerja justru lebih menentukan. Kontradiksi ini mengisyaratkan bahwa hubungan mekanis antara pengangguran terbuka dan kemiskinan mungkin dimoderasi oleh variabel-variabel lain, seperti struktur ekonomi regional dan kualitas tenaga kerja. Di luar Indonesia, hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan, serta antara pengangguran dan peningkatan kemiskinan, juga ditemukan dalam studi Ngubane, Mndebele, & Kaseeram (2023) di Afrika Selatan, yang menyoroti bahwa guncangan positif dan negatif dari pertumbuhan ekonomi sama-sama berdampak pada tingkat kemiskinan.

Di sisi lain, hubungan antara inflasi dan kemiskinan juga menghasilkan bukti empiris yang beragam, sangat tergantung pada jenis dan penyebab inflasi itu sendiri. Ivanic & Martin (2008) dalam penelitiannya yang berpengaruh menyimpulkan bahwa kenaikan harga pangan global—sebuah bentuk inflasi cost-push—cenderung secara signifikan meningkatkan kemiskinan di negara-negara berpendapatan rendah. Hal ini terjadi karena sebagian besar rumah tangga miskin adalah konsumen bersih (net consumer) dari bahan pangan, sehingga kenaikan harga langsung mengurangi daya beli dan kesejahteraan mereka. Temuan ini memperkuat argumen bahwa inflasi yang berasal dari sisi penawaran (cost-push) sangat berbahaya bagi kelompok rentan.

Namun, identifikasi yang tepat terhadap jenis inflasi menjadi kunci. Adhikari, Rao, & Boudreaux (2025) dan Chen & Semmler (2025) sama-sama menegaskan bahwa inflasi yang didorong oleh faktor cost-push, seperti yang terjadi baru-baru ini di AS dan Australia, tidak akan efektif ditangani dengan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter kontraktif justru berisiko memperburuk situasi ekonomi tanpa menyelesaikan akar masalah kenaikan biaya produksi. Dampak inflasi terhadap kesejahteraan subjektif juga berbeda antara negara maju dan berkembang. Fadillah (2025) menemukan bahwa inflasi berdampak negatif pada kebahagiaan di negara berpendapatan rendah, tetapi justru dapat berkorelasi positif di ekonomi maju di mana inflasi mungkin mencerminkan permintaan yang kuat dan vitalitas ekonomi.

Beberapa penelitian terdahulu juga menekankan pendekatan yang lebih holistik dan multidimensi dalam memahami kemiskinan. Dartanto & Otsubo (2013), dengan menggunakan data panel di Indonesia, menunjukkan bahwa dinamika kemiskinan tidak

hanya ditentukan oleh faktor moneter, tetapi juga oleh pendidikan, ukuran rumah tangga, aset, akses listrik, dan kerentanan terhadap guncangan kesehatan. Sementara itu, Ayoo (2022) dalam kajiannya menyarankan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan strategi komprehensif yang melampaui pengendalian inflasi atau pengangguran saja, mencakup stimulus pertumbuhan ekonomi, reformasi kelembagaan, penguatan UMKM melalui mikrofinansial, dan program bantuan sosial yang tepat sasaran.

Dengan mempertimbangkan temuan-temuan terdahulu yang saling melengkapi dan terkadang bertolak belakang ini, penelitian ini berusaha untuk mengisi celah dengan menganalisis secara spesifik interaksi antara pengangguran terbuka dan inflasi dalam memengaruhi kemiskinan di Indonesia dalam periode yang lebih mutakhir (2015-2024). Konteks Indonesia yang unik dengan karakteristik geografis dan struktural ekonominya yang beragam menjadikan analisis ini penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan kontekstual.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun berdasarkan teori dan temuan empiris yang menjelaskan mekanisme pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (X1) dan Tingkat Inflasi (X2) terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Y). Secara teoretis, hubungan ini dapat dilacak dari Teori Lingkaran Setan Kemiskinan yang dikemukakan oleh Nurkse (dalam Bauer, 2019), di mana kondisi kemiskinan menciptakan dan memperkuat faktor-faktor yang pada akhirnya menjebak masyarakat dalam kemiskinan itu sendiri. Dalam konteks ini, pengangguran terbuka berperan sebagai pemutus mata rantai pendapatan. Ketika seseorang menganggur, ia kehilangan sumber penghasilan utama, yang secara langsung menurunkan daya beli dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mendorong individu atau rumah tangga ke dalam jurang kemiskinan (Johan dkk., 2024). Dampak ini semakin diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, yang membatasi mobilitas pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, menciptakan sebuah siklus yang sulit terputus (Rambe dkk., 2023).



Sementara itu, inflasi mempengaruhi kemiskinan melalui mekanisme yang berbeda, yaitu erosi daya beli. Inflasi, terutama yang bersifat *cost-push* atau didorong oleh kenaikan harga komoditas pokok seperti pangan, secara tidak proporsional membebani rumah tangga miskin karena sebagian besar pengeluaran mereka dialokasikan untuk konsumsi dasar (Ivanic & Martin, 2008). Kenaikan harga-harga ini menyebabkan pendapatan riil masyarakat miskin menyusut, sehingga barang dan jasa yang sebelumnya dapat diakses menjadi semakin di luar jangkauan. Berdasarkan temuan Adhikari dkk. (2025) dan Fadillah (2025), inflasi yang didorong faktor *cost-push* seperti ini memiliki dampak negatif yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat di negara berpendapatan rendah seperti Indonesia. Dengan demikian, baik pengangguran yang memutus arus pendapatan maupun inflasi yang menggerogoti nilai riil pendapatan, sama-sama berkonvergensi untuk meningkatkan kerentanan ekonomi dan memperluas

jumlah penduduk miskin. Secara skematis, kerangka pemikiran ini menggambarkan suatu alur di mana X1 (Pengangguran Terbuka) dan X2 (Inflasi) secara simultan dan positif mempengaruhi peningkatan Y (Jumlah Penduduk Miskin), dalam sebuah siklus yang diperkuat oleh struktur ekonomi dan sosial yang ada.

Hipotesis Penelitian

1. **H1: Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Y) di Indonesia.** Dugaan ini didasari oleh logika bahwa peningkatan jumlah pengangguran secara langsung berarti penambahan jumlah rumah tangga yang kehilangan sumber pendapatan primer. Kondisi ini akan menyulitkan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar, sehingga secara langsung mendorong peningkatan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Temuan empiris dari Johan dkk. (2024) di Indonesia memberikan dukungan kuat bagi hubungan positif ini.
2. **H2: Diduga Tingkat Inflasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Y) di Indonesia.** Hipotesis ini diajukan dengan pertimbangan bahwa inflasi, terutama yang bersumber dari kenaikan harga kebutuhan pokok (*cost-push inflation*), akan mengikis daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan tetap dan rendah. Penurunan daya beli ini membuat rumah tangga miskin semakin kesulitan untuk mempertahankan konsumsi standar hidup minimumnya, dan dapat menjerumuskan rumah tangga yang sebelumnya berada di sekitar garis kemiskinan menjadi miskin. Dukungan untuk hipotesis ini dapat dilihat dari penelitian Ivanic & Martin (2008) serta Fadillah (2025) yang mengonfirmasi dampak negatif inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat miskin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder time-series tahunan untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia selama periode sepuluh tahun, dari 2015 hingga 2024. Seluruh data diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Jumlah Penduduk Miskin, yang dinyatakan dalam juta jiwa. Untuk menjaga konsistensi temporal, digunakan data yang dirilis pada bulan Maret setiap tahunnya. Variabel independen terdiri dari dua faktor. Pertama, Tingkat Pengangguran Terbuka (X1) yang didefinisikan sebagai persentase angkatan kerja yang sedang tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha atau mencari pekerjaan. Data TPT yang digunakan adalah data per Februari setiap tahunnya. Kedua, Tingkat Inflasi (X2) yang diukur berdasarkan perubahan tahunan (*year-on-year*) Indeks Harga Konsumen (IHK). Data yang digunakan adalah inflasi umum tahunan. Tabel 1 menyajikan data lengkap dari ketiga variabel yang digunakan dalam analisis.

Tabel 1. Data Kemiskinan, Pengangguran, dan Inflasi Indonesia (2015-2024)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)	TPT - Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Inflasi Tahunan (%)
2015	28.51	11.13	6.18	3.35
2016	27.76	10.7	5.61	3.02
2017	26.58	10.12	5.5	3.61
2018	25.67	9.66	5.34	3.13
2019	24.79	9.22	5.23	2.72
2020	26.42	9.78	7.07	1.68
2021	26.5	9.71	6.49	1.87
2022	25.9	9.57	5.83	5.51
2023	25.22	9.36	5.45	2.61
2024	25.22	9.03	4.82	2.84

Metode analisis data dimulai dengan Statistik Deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data, seperti nilai rata-rata (mean), standar deviasi, serta nilai minimum dan maksimum dari setiap variabel. Selanjutnya, untuk menguji hubungan kausal antar variabel, digunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Model regresi yang diestimasi adalah $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$, di mana Y adalah Jumlah Penduduk Miskin, X1 adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, X2 adalah Tingkat Inflasi, α adalah konstanta, β_1 dan β_2 adalah koefisien regresi, dan e adalah term error.

Guna memastikan hasil estimasi model regresi linier bersifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), maka dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik. Uji Normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa residual model berdistribusi normal. Uji Multikolinearitas dilakukan dengan Variance Inflation Factor (VIF) untuk mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen. Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan Glejser Test untuk memeriksa apakah variance residual bersifat konstan. Serta Uji Autokorelasi dengan statistik Durbin-Watson untuk mengetahui adanya korelasi antar residual pada periode waktu yang berbeda.

Setelah model dinyatakan memenuhi asumsi klasik, dilakukan Uji Hipotesis. Uji t-statistik dilakukan secara parsial untuk menentukan signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen (TPT dan Inflasi) secara individual terhadap variabel dependen (Jumlah Penduduk Miskin). Uji F-statistik dilakukan secara simultan untuk menguji apakah kedua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Terakhir, Koefisien Determinasi (R^2) dihitung untuk mengukur seberapa besar variasi dari Jumlah Penduduk Miskin dapat dijelaskan oleh variasi dari TPT dan Tingkat Inflasi dalam model regresi. Seluruh proses pengolahan data dan analisis ekonometrika dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak EViews 13 Enterprise.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu disajikan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang digunakan dalam penelitian ini. Selama periode observasi dari tahun 2015 hingga 2024, tingkat

kemiskinan (POV) di Indonesia rata-rata sebesar 26,26%, dengan nilai tertinggi mencapai 28,51% dan terendah 24,79%. Deviasi standar sebesar 1,17 mengindikasikan bahwa data kemiskinan relatif stabil dengan fluktuasi yang tidak terlalu besar. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki rata-rata 5,75% dengan kisaran antara 4,82% hingga 7,07%, dan Tingkat Inflasi (INF) rata-rata sebesar 3,03%, bervariasi dari 1,68% hingga 5,51%. Nilai Probability pada uji Jarque-Bera untuk semua variabel yang lebih besar dari 0,05 mengonfirmasi bahwa data berdistribusi normal, sehingga memenuhi asumsi dasar untuk analisis regresi linier.

	POV	TPT	INF
Mean	26.25700	5.752000	3.034000
Median	26.16000	5.555000	2.930000
Maximum	28.51000	7.070000	5.510000
Minimum	24.79000	4.820000	1.680000
Std. Dev.	1.169036	0.663054	1.058082
Skewness	0.678007	0.683919	1.110241
Kurtosis	2.509388	2.694283	4.230030
Jarque-Bera	0.866448	0.818519	2.684798
Probability	0.648415	0.664142	0.261218
Sum	262.5700	57.52000	30.34000
Sum Sq. Dev.	12.29981	3.956760	10.07584
Observations	10	10	10

Hasil Analisis Regresi Linier

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan metode Ordinary Least Squares (OLS), diperoleh persamaan model regresi yang menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut: $POV = 19.95 + 0.97 TPT + 0.25 INF$. Konstanta sebesar 19,95 dapat diartikan sebagai tingkat kemiskinan dasar ketika kedua variabel independen, yaitu TPT dan INF, dianggap nol. Koefisien regresi untuk TPT sebesar 0,97 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan pengangguran terbuka sebesar 1%, tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,97%, dengan asumsi variabel lain konstan. Demikian pula, koefisien inflasi sebesar 0,25 menunjukkan bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar 1%, kemiskinan akan cenderung meningkat sebesar 0,25%.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	19.94783	3.985557	5.005028	0.0016
TPT	0.966421	0.600364	1.609726	0.1515
INF	0.247304	0.376222	0.657336	0.5320

Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama dan individual, serta ketepatan model, dilakukan pengujian hipotesis. Nilai Koefisien Determinasi (R-squared) sebesar 0,272 atau 27,2% mengindikasikan bahwa variasi dari variabel dependen (tingkat kemiskinan) hanya mampu dijelaskan oleh variabel TPT dan INF sebesar 27,2%, sedangkan sisanya 72,8% dijelaskan oleh faktor

lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Hasil Uji F-statistik yang menghasilkan probabilitas (Prob(F-statistic)) sebesar 0,3294, yang jauh lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, menunjukkan bahwa secara serempak, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan dalam periode penelitian ini. Hal ini diperkuat dengan hasil Uji t-statistik untuk masing-masing variabel. Probabilitas untuk koefisien TPT adalah 0,1515 dan untuk INF adalah 0,5320, yang keduanya lebih besar dari $\alpha=0,05$. Dengan demikian, secara parsial, baik Tingkat Pengangguran Terbuka maupun Tingkat Inflasi terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada periode 2015-2024. Temuan ini didukung oleh nilai Durbin-Watson yang rendah, yaitu 0,44, yang mengarah pada adanya indikasi masalah autokorelasi positif dalam model, sehingga interpretasi hasil perlu dilakukan dengan kehati-hatian.

R-squared	0.271849	Mean dependent var	26.25700
Adjusted R-squared	0.063806	S.D. dependent var	1.169036
S.E. of regression	1.131126	Akaike info criterion	3.327629
Sum squared resid	8.956122	Schwarz criterion	3.418405
Log likelihood	-13.63815	Hannan-Quinn criter.	3.228049
F-statistic	1.306694	Durbin-Watson stat	0.439320
Prob(F-statistic)	0.329439		

Interpretasi Hasil X1 (TPT -> Kemiskinan)

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t-hitung untuk variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1.610 dengan signifikansi 0.152. Meskipun nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, secara teoritis dan kontekstual, hubungan antara TPT dan kemiskinan tetap relevan. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, peningkatan pengangguran dapat memengaruhi kemiskinan, meskipun tidak signifikan secara statistik dalam model ini. Temuan ini mendukung teori Keynesian yang menyatakan bahwa pengangguran menyebabkan penurunan permintaan agregat dan pendapatan rumah tangga, yang pada gilirannya dapat memperburuk tingkat kemiskinan (Davidson et al., 1988). Selain itu, hasil ini sejalan dengan penelitian Johan et al. (2024) yang juga menemukan hubungan positif antara pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Secara logis, hal ini dapat diterima karena peningkatan pengangguran berarti berkurangnya jumlah orang yang memiliki penghasilan tetap, yang langsung berdampak pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini tercermin pada lonjakan kemiskinan di tahun 2020 ketika TPT naik menjadi 7,07% akibat pandemi COVID-19.

Interpretasi Hasil X2 (Inflasi -> Kemiskinan)

Sementara itu, untuk variabel Tingkat Inflasi, diperoleh nilai t-hitung sebesar 0.657 dengan signifikansi 0.532. Karena nilai signifikansi jauh lebih besar dari 0.05, maka H2 yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan ditolak. Hasil ini tidak mendukung teori umum yang menyatakan bahwa inflasi selalu memperburuk kemiskinan melalui penurunan daya beli (Ivanic & Martin, 2008). Sebaliknya, temuan ini konsisten dengan penelitian Fadillah (2025) yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek, inflasi yang rendah dan terkendali tidak serta-merta meningkatkan kemiskinan, terutama jika diiringi dengan program bantuan sosial dan subsidi dari pemerintah. Secara logis, hal ini dapat dijelaskan melalui dinamika periode

penelitian. Misalnya, pada tahun 2020–2021, inflasi sangat rendah (di bawah 2%) akibat lemahnya permintaan selama pandemi, namun kemiskinan justru meningkat karena guncangan di sisi penawaran tenaga kerja. Sebaliknya, pada tahun 2022 ketika inflasi mencapai 5,51%, kemiskinan justru turun secara moderat, diduga karena pemulihan ekonomi dan bantuan sosial seperti BLT dan subsidi mampu menahan dampak inflasi terhadap kelompok rentan.

Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari kedua variabel yang diuji, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh yang lebih langsung dan logis terhadap kemiskinan di Indonesia dalam periode 2015–2024. Sementara itu, pengaruh inflasi terhadap kemiskinan lebih kompleks dan tidak signifikan dalam model ini, kemungkinan karena adanya intervensi kebijakan pemerintah dan faktor eksternal lain yang memoderasi hubungan tersebut. Temuan ini menguatkan pentingnya pendekatan multidimensi dalam penanganan kemiskinan, di mana penciptaan lapangan kerja dan perlindungan sosial menjadi lebih krusial dibandingkan sekadar pengendalian inflasi semata (Ayoo, 2022; Dartanto & Otsubo, 2013).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh yang lebih langsung dan konsisten terhadap dinamika kemiskinan di Indonesia pada periode 2015–2024 dibandingkan dengan Tingkat Inflasi. Meskipun secara statistik dalam model ini pengaruhnya tidak signifikan, secara teoritis dan empiris kenaikan TPT cenderung diikuti oleh peningkatan jumlah penduduk miskin, sebagaimana tercermin pada periode krisis pandemi tahun 2020. Sementara itu, inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, menunjukkan bahwa mekanisme hubungannya lebih kompleks dan dapat dimoderasi oleh intervensi kebijakan pemerintah dan faktor eksternal lainnya.

Berdasarkan temuan tersebut, implikasi kebijakan yang dapat direkomendasikan adalah prioritas penanganan kemiskinan hendaknya difokuskan pada penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan penurunan tingkat pengangguran, terutama di sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Di sisi lain, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga, khususnya untuk komoditas pokok, serta memperkuat dan mempertajam program jaring pengaman sosial seperti bantuan langsung tunai dan subsidi yang tepat sasaran. Hal ini penting untuk melindungi kelompok rentan dari dampak guncangan ekonomi, termasuk lonjakan inflasi yang bersifat sementara.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain jumlah observasi data yang relatif kecil ($n=10$) sehingga dapat mempengaruhi kekuatan hasil estimasi regresi. Selain itu, model penelitian belum memasukkan variabel-variabel kontrol lain yang mungkin berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, seperti pertumbuhan ekonomi (PDB), tingkat ketimpangan (Gini Ratio), atau variabel sosial seperti tingkat pendidikan dan kesehatan. Keterbatasan metode analisis regresi linier sederhana juga belum mampu menangkap hubungan non-linier atau interaksi antar variabel.

Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel-variabel penjelas lain yang relevan, menggunakan data dengan frekuensi yang lebih tinggi (misalnya data triwulanan) untuk memperbanyak observasi, serta

mempertimbangkan penggunaan metode analisis yang lebih robust seperti analisis data panel jika cakupan wilayah diperluas, atau model Vector Autoregression (VAR) untuk menangkap dinamika waktu antar variabel. Pendekatan kualitatif juga dapat dilibatkan untuk memperdalam pemahaman kontekstual di balik hubungan angka-angka yang teramati.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adhikari, D. R., Rao, S. P. U., & Boudreaux, D. (2025). IS CURRENT INFLATION A DEMAND-PULL OR A COST-PUSH? *International Journal of Business & Economics (IJBE)*. <https://doi.org/10.58885/ijbe.v10i1.9.da>
2. Ayoo, C. (2022). Poverty Reduction Strategies in Developing Countries. *Rural Development - Education, Sustainability, Multifunctionality*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.101472>
3. Bauer, P. (2019). The Vicious Circle of Poverty. *The Gap between Rich and Poor*. <https://doi.org/10.4324/9780429311208-23>
4. Billah, S., Hakim, A., Lestari, W., Indri, F., Wahyuni, N., Hanifah, F., Reza, A., Zahara, M. A., Ramadhan, & al. (2023). ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE UNEMPLOYMENT RATE ON POVERTY RATE IN INDONESIA. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)*. <https://doi.org/10.59066/ijoms.v2i2.354>
5. Chen, P., & Semmler, W. (2025). Inflation: Demand Pull or Cost Push? A Markov Switching Approach. *Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4692473>
6. Costa, R. F. R. D., & Castelar, L. I. M. (2024). Estimating structural and frictional unemployment: An application of empirical mode decomposition. *Revista Brasileira de Economia*. <https://doi.org/10.5935/0034-7140.20240005>
7. Dartanto, T., & Otsubo, S. (2013). The determinants of poverty dynamics in Indonesia: evidence from panel data. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. <https://doi.org/10.1080/00074918.2013.772939>
8. Davidson, C., Martin, L. W., & Matusz, S. (1988). The Structure of Simple General Equilibrium Models with Frictional Unemployment. *Journal of Political Economy*. <https://doi.org/10.1086/261587>
9. Dworak, M., Prskawetz, A., & Feichtinger, G. (2016). From Vicious Circles to Cycles of Poverty.
10. Fadillah, M. I. (2025). Inflation, Income, and Happiness: Contrasting Low-Income Developing Countries and Advanced Economies. *American Journal of Economic and Management Business (AJEMB)*. <https://doi.org/10.58631/ajemb.v4i1.180>
11. Fitri, M. (2022). Efforts to Manage the Unemployment and Poverty Problems in Indonesia. *Proceedings of the 6th International Conference on Science, Education and Technology (ISET 2020)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211125.083>
12. Headey, D., & Martin, W. (2016). The Impact of Food Prices on Poverty and Food Security. *Annual Review of Resource Economics*. <https://doi.org/10.1146/ANNUREV-RESOURCE-100815-095303>
13. Holzman, F. (2016). INFLATION: COST-PUSH AND DEMAND-PULL.

14. Hurry, J. (1917). Poverty and its Vicious Circles. *Nature*.
<https://doi.org/10.1038/099083a0>
15. Ivanic, M., & Martin, W. (2008). Implications of Higher Global Food Prices for Poverty in Low-Income Countries. *World Bank: Infrastructure (Topic)*.
<https://doi.org/10.1111/J.1574-0862.2008.00347.X>
16. Johan, M., Febrianti, L. A., Wahyuningtyas, I., Salim, F., & Prawira, F. D. (2024). The Influence of Unemployment on Poverty Levels in Indonesia. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*. <https://doi.org/10.58355/organize.v3i2.65>
17. Koning, P., Ridder, G., & Berg, G. J. (1995). Structural and Frictional Unemployment in an Equilibrium Search Model with Heterogeneous Agents. *Journal of Applied Econometrics*. <https://doi.org/10.1002/JAE.3950100508>
18. Latifah, S. N., Fathorrazi, M., Yuliati, L., & Yunitasar, D. (2023). Modeling Poverty Alleviation in Indonesia according to Ibnu Khaldun Philosophy (an approach to morality in the Qur'an). *Pharos Journal of Theology*.
<https://doi.org/10.46222/pharosjot.1059>
19. Mishra, N., Grima, S., & Ozen, E. (2024). Unpacking the black box: Investigating the role of social protection programmes in promoting decent work and economic growth in low-income countries. *Sustainable Development*. <https://doi.org/10.1002/sd.3008>
20. Neves, J. C. (1988). Poverty equilibrium—An introductory systemic analysis. *European Journal of Operational Research*.
[https://doi.org/10.1016/0377-2217\(88\)90285-8](https://doi.org/10.1016/0377-2217(88)90285-8)
21. Ngubane, M. Z., Mndebele, S., & Kaseeram, I. (2023). Economic growth, unemployment and poverty: Linear and non-linear evidence from South Africa. *Heliyon*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20267>
22. Rambe, R. A., Purmini, P., Alfansi, L., Armelly, A., & Yusnida, Y. (2023). Examining the roles of labor factors, investment, and industrialization in poverty alleviation: Empirical evidence from Sumatra, Indonesia. *Poverty & Public Policy*.
<https://doi.org/10.1002/pop4.385>